

ABSTRAK

Dimas Praja Subroto (0810612006). Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Cinere Limo Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dibawah bimbingan Dr. Erni Agustina, SH,Sp.N.

Pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan karena pencatatan perkawinan merupakan suatu syarat diakui dan tidaknya perkawinan oleh negara. Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana pengaturan tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Cinere Limo dan Apakah masyarakat di Kecamatan Cinere telah melaksanakan perkawinan sesuai dengan pasal 2 Ayat 2 Undang – undang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode perbandingan hukum penelitian yuridis normatif, Analisis empiris serta metode penelitian kualitatif. Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam usaha menganalisis data dengan mengacu kepada norma – norma hukum yang dituangkan dalam perundang – undangan. metode yuridis empiris / sosiologis serta metode penelitian kualitatif untuk meneliti kenyataan yang ada di masyarakat, meneliti bagaimana penerapan di lapangan terhadap peraturan – peraturan dan undang – undang tentang perkawinan di masyarakat khususnya tentang pencatatan suatu perkawinan yang ada di masyarakat. Ketentuan tentang pencatatan dalam perkawinan di Indonesia di atur dalam PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun pelaksanaannya pada tingkat yang paling rendah (Kantor Urusan Agama) masih perlu penelitian apakah sudah sesuai dengan PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kata Kunci : Pencatatan Perkawinan

ABSTRACT

Dimas Praja Subroto (0810612006). Implementation of the Registration of Marriages in the District KUA Cinere Limo Seen From Act number 1, 1974. Under the tutoring of Dr. Erni Agustina, SH,Sp.N.

Registration of marriages plays a very decisive in a marriage because marriage is a condition of recording and whether marriage is recognized by the state. Act number 1, 1974 about Marriage states that marriage is a bond between the inner and outer man with one woman as husband and wife in order to establish a family (household) a happy and lasting based on Belief in God Almighty. Under the provisions of Article 2 paragraph (1) and paragraph (2) of Act number 1, 1974 about Marriage is valid if conducted according to the laws of each religion or belief, and every marriage is recorded according to the legislation applicable. As for the problems in this thesis is how the regulation on the implementation of the registration of marriages in the district KUA Cinere Limo and Cinere Do people in the District has conducted a marriage in accordance with article 2 paragraph 2 of Act number 1, 1974 about Marriage. This study uses comparative law juridical normative research, Analisis empirikal and qualitative research methods. Normative juridical approach is used in an attempt to analyze the data with reference to the norm - the norm of law as outlined in the legislation - an invitation. juridical methods of empirical / sociological and qualitative research methods to examine the realities in society, examining how the field application of the rules - the rules and laws - laws of marriage in society, especially about the registration of a marriage that is in the community. Provisions regarding the registration of marriages in Indonesia are set in PP No.9 of 1975 on the Implementation of Act number 1, 1974 about Marriage. However, its implementation at the lowest level (Office of Religious Affairs) still need to research whether it is in accordance with Regulation 9 of 1975 on the Implementation of Act number 1, 1974 about Marriage.

Keyword: Registration of Marriages